

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BABI.PENDAHULUAN .....</b>	<b>01</b>
1.1 Latar Belakang .....	01
1.2 Kerangka Konseptual .....	33
<b>BAB II. MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PERTAMBANGAN BATUBARA .....</b>	<b>46</b>
2.1 Kewajiban Negara dan Hak Warga Negara Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat.....	46
2.1.1 Filosofi Hak Atas Lingkungan yang Baik & Sehat..	46
2.1.2 Kewajiban Negara dan Warga Negara Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat.....	80
2.2 Hakekat Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat dalam Pertambangan Batubara.....	90
2.2.1 Hak Gugat Pada Masyarakat Hukum Adat dalam Pertambangan Batubara.....	114
2.2.2 Kepentingan Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat dalam Pertambangan Batubara.....	120
2.2.3 Hubungan Hukum Hak Gugat pada Masyarakat Hukum Adat dalam Pertambangan Batubara.....	127
2.2.4 Ganti Rugi Masyarakat Hukum Adat dalam Pertambangan Batubara.....	135

<b>BAB III. ADAT YANG DAPAT MELAKUKAN HAK</b>	
<b>GUGAT MASYARAKAT HUKUM ADAT.....</b>	<b>142</b>
3.1 Karakteristik Masyarakat Hukum Adat dalam Pertambangan Batubara.....	142
3.1.1 Sekelompok Orang.....	142
3.1.2 Tunduk Pada Suatu Tata Tertib.....	149
3.1.3 Mempunyai Harta Sendiri Baik yang Berupa Materiil maupun Immaterial.....	156
3.1.4 Mempunyai Wilayah.....	174
3.1.5 Tidak Ada Niat Untuk Membubarkan Diri.....	179
3.1.6 Hubungan Antara Lingkungan dan Masyarakat Hukum Adat Tidak Terpisahkan (Holistik).....	180
3.2 Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dan Pengkakuannya.....	183
3.2.1 Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat.....	183
3.2.2 Pengakuan Internasional Masyarakat Hukum Adat.....	207
3.2.3 Pengakuan Nasional Masyarakat Hukum Adat....	216
3.2.4 Pengakuan Masyarakat Hukum Adat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi.....	219
3.2.5 Pengakuan Masyarakat Hukum Adat melalui Peraturan Daerah.....	225
3.3 Pengaturan Masyarakat Hukum Adat di Philipina.....	238
3.3.1 Sistem Hukum Terhadap Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.....	240
3.3.2 Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat .....	243
3.3.3 Komisi Nasional Masyarakat Hukum Adat .....	252
3.3.4 Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat	255

3.3.5	Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dalam Pertambangan Batubara di Negara Indonesia dan Philipina .....	258
-------	--	-----

**BAB IV. IMPLEMENTASI HAK GUGAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PERTAMBANGAN BATUBARA .....** 262

4.1	Putusan Mahkamah Konstitusi yang Mengakui <i>Legal Standing</i> Masyarakat Hukum Adat.....	262
-----	--	-----

4.1.1	Putusan Nomor 010/PUU-1/2003 Perihal Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.....	264
-------	--	-----

4.1.2	Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku.....	266
-------	---	-----

4.1.3	Putusan Nomor 6/PUU-VI/2008 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan.....	272
-------	--	-----

4.1.4	Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.....	274
-------	--	-----

4.1.5	Putusan Nomor Nomor 25/PUU-VIII/2010 tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.....	278
4.1.6	Putusan Nomor 10/PUU–XII/2014 tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.....	281
4.2	<i>Ius Constituendum</i> pada Masyarakat Hukum Adat dalam Pertambangan Batubara.....	282
4.2.1	Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat.....	282
4.2.2	Prinsip <i>Free and Prior Inform Concern</i> .....	301
 <b>BAB V. PENUTUP</b>		
5.1	Kesimpulan .....	314
5.2	Saran .....	316
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		
<b>BIODATA PENULIS.....</b>		<b>336</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>		<b>337</b>
<b>INDEX.....</b>		<b>342</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 01	Macam-Macam Dampak Dalam Pertambangan Batubara .....	01
Tabel 02	Kelemahan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .....	16
Tabel 03	Argumentasi Pengembangan Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat.....	25
Tabel 04	Hak Gugat Lingkungan Pada Undang- Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	27
Tabel 05	Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah Terkait dengan Masyarakat Hukum Adat Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	61
Tabel 06	Prinsip-Prinsip Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan.....	64
Tabel 07	Perbandingan Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Gugat masyarakat (Pasal 90 UUPPLH).....	96
Tabel 08	Perluasan Konsep Hak Gugat yang ada di UUPPLH.....	97
Tabel 09	Pengaturan Macam-Macam Hak Gugat Menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Perkara Lingkungan Hidup.....	107
Tabel 10	Pemohon Masyarakat Hukum Adat dalam Perkara Mahkamah Konstitusi.....	190

Tabel 11	Peraturan Daerah Terkait Lembaga Adat.....	200
Tabel 12	Kewajiban Negara Terhadap Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undang.....	203
Tabel 13	Pengakuan dan Perlindungan Terhadap <i>Indigenous People</i> dengan Lingkungan Hidup.....	212
Tabel 14	Pengakuan Secara Nasional Dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undangan Masyarakat Hukum Adat.....	218
Tabel 15	Daftar Putusan Mahkamah Konstitusi yang Terkait Masyarakat Hukum Adat.....	220
Tabel 16	Perbedaan Syarat/Ukuran Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat.....	270
Tabel 17	Beberapa Kendala Masyarakat Hukum Untuk Mengajukan Hak Gugat.....	300
Tabel 18	Subtansi Pengaturan Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.....	310

## DAFTAR GAMBAR

Gambar Peta 01	Peta Pertambangan di Indonesia.....	02
Gambar Peta 02	Peta Penyebaran Batubara dan Cadangan Sumber Daya Batubara di Indonesia Tahun 2011.....	02
Gambar Peta 03	Target Pemanfaatan Batubara.....	03
Gambar Peta 04	Peruntukan Batubara.....	03
Gambar Peta 05	IUP Batubara di Kabupaten Kutai Kertanegara.....	06
Gambar Peta 06	Peta Wilayah Kuasa Pertambangan Batubara Kota Samarinda.....	07
Gambar Peta 07	Peta Sebaran Tambang Mineral dan Batubara dan Blok Migas di Indonesia.....	07
Gambar Peta 08	Daya Rusak pertambangan Batubara Pada Masyarakat Hukum Adat.....	10
Gambar Peta 09	Konsep Kewajiban Negara dan Hak Warga Negara Dalam Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat.....	69
Gambar Peta 10	Konsep Hak Gugat Masyarakat.....	94
Gambar Peta 11	Hubungan Hukum Hak Gugat Pada Masyarakat Hukum Adat.....	128
Gambar Peta 12	Pembagian Perikatan dalam Perbuatan Melanggar Hukum di Hukum Perdata.....	130